



2025

RENCANA AKSI PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASER



FORM
RENCANA AKSI PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN 2025	TRIWULAN				RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum	Rata-rata nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	-	BB	-		Nilai dari Inspektorat		Sekretaris Daerah	193,274,113,768
		Indeks kepuasan layanan administrasi umum	90	-	-	-	90	Survey yang dilakukan per triwulan			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	76	-	-	-	76	Akhir tahun akan dilaksanakan survey	138,520,273,902	Asisten Administrasi Umum	
1.1	(1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	-	-	-	100		809,245,822	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	-	3	3	1. Pembentukan SK Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan ranwal Renja tahun 2025	630,532,601	Perencana Ahli Muda	
								2. Menyusun PK, RA, Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, KAK, RKT dan ranwal Renja tahun 2024			
								3. Menyusun Rencana Kerja Perubahan, PK Perubahan, KAK Perubahan tahun 2025 dan menyusun Rakhir Renja 2025			
								4. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran per triwulan I,II, III dan IV			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	12	-	12	-	-	1. Berkoordinasi dalam penyusunan RKA perubahan dengan Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.	92,843,692	Perencana Ahli Muda	
								2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni 2026 dan RKA Perubahan 2025			
								3. Input RKA Perubahan Setda tahun 2024 dan RKA Murni 2025 ke aplikasi SIPD RI			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	1	1	1	9	1. Rapat persiapan dan pembentuka TIM	85,869,529	Perencana Ahli Muda	Ada perubahan target dari 5 dok menjadi 12 dok / salah penetapan target di awal tahun
								2. Pembagian tugas dan jadwal			
								3. Pengumpulan data dari bagian-bagian intern Sekretariat Daerah			
								4. Rapat dan menyusun laporan capaian kinerja (LKJIP) 2024 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat tahun 2025			
								5. Penyusunan TEPPRA			
								6. Penyusunan Evaluasi Renja			
								7. Penyusunan SPIP			
(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	25	25	30	20		44,012,239,788	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan		
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4284 Orang	486	648	648	2502	1. Menyusun rencana kerja dan angkas Sub Kegiatan	42,949,301,742	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 2268 dok menjadi 4284 dok : Karena adanya jumlah ASN tidak bisa di prediksi dikarenakan berdasarkan mutasi & rekrutmen PPPK dan CPNS di 2025
								2. Membuat daftar dan rekapan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan			
								3. Bagian keuangan akan memverifikasi dan memproses pencairan sesuai dengan ketentuan			
								4. Penyusunan laporan realisasi kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

5	Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	725 Dokumen	181	181	181	182	1. Rapat persiapan pembentukan TIM Verifikasi 2. Pembagian Tugas verifikator perwilayah/bagian 3. Pelaksanaan pengujian keabsahan dokumen, melakukan verifikasi dokumen SPP dan SPM serta melakukan penatausahaan keuangan	865,746,806	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1	-	-	1	1. Membuat SK TIM 2. Berkoordinasi dengan semua bendahara pembantu dilingkungan Sekretariat Daerah 3. Menghimpun data laporan keuangan 4. Melaksanakan sinkronisasi data dan laporan keuangan 5. Menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 6. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan	23,038,051	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	1. Menyusun SK Tim penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran 2. Berkoordinasi dengan semua bendahara pembantu dilingkungan Sekretariat Daerah 3. Melaksanakan rekonsiliasi bulanan/triwulan dan semester	174,153,189	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
(3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	25	25	30	20		995,240,000	Kepala Bagian Umum	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	3	3	3	3	1. Menyiapkan Informasi data kepegawaian 2. Melakukan pengusulan perencanaan dan pengembangan karir pegawai 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dibidang kepegawaian 4. Fasilitasi/proses kenaikan pangkat 5. Penerbitan KGB 6. Pemberian Cuti 7. Fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga PTT dan kepegawaian lainnya 8. Menyiapkan ABSENSI ASN dan PTT	584,240,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	180 Orang	-	-	90	90	1. Terkumpulnya data kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur tahun 2025 Triwulan I sampai IV 2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur tahun 2025	411,000,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	25	25	30	20		30,613,116,514	Kepala Bagian Umum	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	1	1	2	2	1. Menginput Data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan barang dan melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	177,285,542	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17 Paket	1	7	8	1	1. Menginput Data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan barang dan melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	10,306,279,028	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	5	8	8	4	Tenwedainya peralatan rumah tangga pada Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,100,000,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30 Paket	2	13	13	2	1.Menginput Data SIRUP 2. Menyusun Harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan barang dan melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	582,027,552	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	1	3	3	2	1.Menginput Data SIRUP 2. Menyusun Harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan barang dan melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	85,094,930	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
15	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	150 Laporan	40	40	40	30	Terfasilitasinya kegiatan kunjungan tamu baik yang berada dalam lingkungan	12,802,218,465	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	3	3	3	3	1. Terlaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi pada bulan Triwulan I sampai IV 2. Membuat Berita acara hasil rapat koordinasi dan konsultasi 3. Terlaksananya Kunjungan kerja 4. Koordinasi dengan Instansi Terkait	5,560,210,997	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
1.6	(5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	25	25	30	20		31,066,468,395	Kepala Bagian Umum	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	3	3	3	3	1. Menginput data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan Jasa atau barang serta melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	5,723,157,699	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	1	1	2	1	1. Menginput data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan Menyediakan jasa atau barang setelah itu melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	15,654,416,940	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

20	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2	4	5	1	1. Menginput data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan Menyediakan jasa atau barang setelah itu melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran ke rekanan	9.688,893,756	Analisis Kebijakan Ahli Muda
(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan BMD	100	25	25	30	20	15,699,150,600	Kepala Bagian Umum
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit		1	1	1	1. Menyusun Data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 5. Rekanan menyediakan jasa atau barang setelah itu melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran	948,735,600	Analisis Kebijakan Ahli Muda
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan penzinaan	20 Unit					1. Menyusun Data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan jasa atau barang setelah itu melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran	1,258,128,950	Analisis Kebijakan Ahli Muda
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dioelihara /direhabilitasi	3 Unit		1	1	1	1. Menyusun Data SIRUP 2. Menyusun harga HPS 3. Membuat surat permintaan belanja dan spesifikasi dari PPTK ke Pejabat Pengadaan atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran 4. Pejabat Pengadaan membuat surat permintaan pembelian ke rekanan 5. Rekanan menyediakan jasa atau barang setelah itu melampirkan Nota dan Invoice 6. Membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran 7. Membuat Berita Acara Penyelesaian dari Kuasa Pengguna Anggaran	13,492,286,050	Analisis Kebijakan Ahli Muda
(7) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	100	25	25	30	20	2,539,161,688	Kabag Umum / Kabag Perenc dan Keuangan
24	Penyedia gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	28 orang/Bulan	6	8	8	6	1. Menyusun rencana kerja dn angkas Sub Kegiatan 2. Membuat daftar dan rekapan gaji dan tunjangan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Bagian keuangan akan menverifikasi dan memproses pencairan sesuai dengan ketentuan 4. Penyusunan laporan realisasi kinerja sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	407,485,688	Analisis Kebijakan Ahli Muda
25	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan	10 Paket	-	10	-	-		1,231,676,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

26	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	2	2	2	2	1. Koordinasi dengan Steakholder terkait 2. Terlaksananya Medical Check UP Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	300,000,000	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
27	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	3	3	3	3	1. Menyusun rencana kerja dan angkas Sub Kegiatan 2. Pengujian rekapitulasi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana penunjang operasional kebagian keuangan beserta kelengkapannya setiap bulan 3. Bagian keuangan akan memverifikasi dan memproses pencairan sesuai dengan ketentuan 4. penyusunan laporan realisasi kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600,000,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
1.9	(8) Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang difasilitasi	100	25	25	30	20		5,745,677,960	Kepala Bagian Umum	
28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	3	3	3	3	Berkoordinasi dengan Admin KDH yang berada diRumah Kedinasan mengenai Seleuruh kebutuhan Belanja Pada RT KDH	2,654,410,650	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah yang disediakan	12 Paket	3	3	3	3	Berkoordinasi dengan Admin WKDH yang berada diRumah Kedinasan mengenai Seleuruh kebutuhan Belanja Pada RT WKDH	2,491,267,310	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
30	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang tersedia	12 Paket	3	3	3	3	Berkoordinasi dengan Admin KDH yang berada diRumah Kedinasan mengenai Seleuruh kebutuhan Belanja Pada RT Sekda	600,000,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
1.10	(9) Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	100	25	25	30	20		1,555,961,240	Kepala Bagian Organisasi	
31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	12 Dokumen	0	0	0	12	1. Identifikasi kebutuhan dan regulasi terkait kelembagaan dan jabatan 2. Pengumpulan data organisasi dan jabatan yang ada 3. Penyusunan draft dokumen kelembagaan (kedudukan, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja) 4. Analisis jabatan (deskripsi dan spesifikasi jabatan) 5. Validasi dan konsultasi dengan pihak terkait 6. Finalisasi dan pengesahan dokumen 7. Sosialisasi dan implementasi dokumen	696,111,541	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 41 dok menjadi 12 dok : penginputan pertama dasarnya adalah jumlah opd yg ada, bukan jumlah dokumen yg di hasilkan sehingga muncul 41 setelah di kaji dokumen yg di hasilkan di kelompokkan menjadi 12
32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	7 Dokumen	0	1	1	5	1. Rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan sistem kerja, pelaksanaan penyusunan perbup tentang pakiaian dinas ASN, pendampingan penyusunan evaluasi peta proses bisnis, pendampingan penyusunan SOP, pendampingan penyusunan standar pelayanan publik, pendampingan penyusunan dokumen SKM dan kegiatan terkait ketatalaksanaan lainnya. 2. Sosialisasi terkait pelaksanaan sistem kerja, penyusunan dokumen tata naskah dinas, penyusunan evaluasi peta proses bisnis, penyusunan SOP, penyusunan standar pelayanan publik, penyusunan dokumen SKM dan kegiatan terkait ketatalaksanaan lainnya. 3. Menyusun draft kebijakan terkait pelayanan publik dan ketatalaksanaan 4. Menyusun draft Peraturan Bupati tentang Pakiaian Dinas ASN 5. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan evaluasi peta proses bisnis, pendampingan penyusunan SOP, pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik, pendampingan penyusunan dokumen SKM dan kegiatan terkait ketatalaksanaan lainnya. 6. Melaksanakan perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana. 7. Laporan hasil akhir	319,797,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 4 dok menjadi 7 dok
33	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	0	1	1	0	1. Pembentukan Tim RB 2. Rapat Tim RB 3. Rapat dengan PD yang menjadi locus RB 4. Penyusunan Road Map RB 5. Penyusunan Rencana Aksi RB 6. Koordinasi dengan Pemprop Kaltim 7. Koordinasi dengan Inspektorat 8. Monev RB 9. Penginputan data RB TW 1,2,3,4 pada portal	378,741,699	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

34	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	0	0	1	1	1. Rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan movev pelayanan publik dan ketatalaksanaan, penilaian kepatuhan pelayanan publik, dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2. Menyusun draft SK Tim Movev 3. Sosialisasi terkait penilaian kepatuhan pelayanan publik, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 4. Pelaksanaan movev pelayanan publik dan ketatalaksanaan 5. Fasilitasi dan pendampingan penilaian kepatuhan pelayanan publik 6. Pendampingan dan Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 7. Melaksanakan perjalanan dinas terkait koordinasi dan konsultasi movev pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana.	48,712,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 Dokumen	2	0	0	1	1. Pembentukan Tim Saki 2. Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kabupaten 3. Rapat Pencapaian IKU Kabupaten dengan Perangkat Daerah 4. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja 5. Penyusunan PK Bupati 6. Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten 7. Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten 8. Movev laporan kinerja perangkat daerah 9. Melakukan Koordinasi dengan Pemprop 10. Penyusunan PK Perubahan	112,599,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda
(10) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100	25	25	30	20		5,484,011,895	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
36	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	12 Laporan	3	3	3	3	1. menyusun jadwal kegiatan KDH dan WKDH 2. Memfasilitasi Keprotokolan kegiatan KDH dan WKDH	2,743,837,783	Kasubbag Protokol
37	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Laporan	3	3	3	3	1. Monitoring evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan 2. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan bicara pimpinan daerah 3. Melakukan fasilitasi informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak dengan kebutuhan dan alau arahan pimpinan 4. Menyiapkan dan pengandaan bahan materi rapat dan bahan pidato 5. Menyusun naskah sambutan dan pidato kepala Fdaerah dan Wakil kepala Daerah 6. Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daeah dan Wakil Kepala daerah	1,451,194,013	Penata Hubungan Mssyarakat Ahli Muda
38	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	12 Laporan	3	3	3	3	1. Melihat Jadwal dan Menyusun rencana Kegiatan berdasarkan jadwal 2. Melakukan pendokumentasian kegiatan pimpinan 3. Melakukan Publikasi kegiatan Pimpinan 4. Melakukan Evaluasi dan pelaporan kegiatan	1,288,980,099	Penata Hubungan Mssyarakat Ahli Muda

	(12) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev dalam menyusun Kebijakan	100	25	25	30	20		40,216,127,323	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
42	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spritual	400	157	100	50	93	<p>Hibah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima SPJ hibah 2024 - merekap usulan hibah 2025 - mengusulkan keTAPD - koordinasi ke inspektorat - koordinasi dengan BPKP samarinda - membuat SK Bupati - pencairan dana hibah - monitoring dan evaluasi - menerima laporan / SPJ 2025 <p>Rapat-Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi rapat Poltek Kelautan - rapat sumbangan masjid - fasilitasi rapat-rapat OPD <p>Rapat Koordinasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Poltek Kelautan Sidoarjo <ul style="list-style-type: none"> - persiapan MoU di Sidoarjo - MoU - PKS - rekrutmen - pengantaran calon mahasiswa b. Polnes Paser c. Poltek Pariwisata NHI Bandung : <ul style="list-style-type: none"> - MoU - PKS - rekrutmen - pengantaran calon mahasiswa d. Poltekes <p>Haji :</p> <ul style="list-style-type: none"> - usul pendamping haji - sosialisasi haji - manasik haji - persiapan bus haji - pemberangkatan haji - pemulangan haji <p>DA'1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekap laporan Da'i - pembayaran gaji Da'i - penambahan Da'i <p>Beasiswa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerjasama dan stimulan <p>Pendistribusian Sapi Qurban :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendistribusian <p>Kegiatan LPTQ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTQ provinsi - STQ tingkat nasional kendari - MTQ kab. paser di tanjung harapan <p>Mengakomodir Pelatihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da'i muda - fardhu kifayah 	32,766,531,597	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 357 dok menjadi 400 dok : ada penambahan dokumen karena beasiswa stimulan, kerjasama dan Da'i

43	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, admonstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	200	20	20	30	130	Rapat Koordinasi : - bidang kesehatan - kelenagakerjaan - pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	7,195,484,105	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 100 dok menjadi 200 dok, ada kesalahan penulisan target seharusnya untuk target tetap 100 dok
44	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan transibun linmas	50	3	4	4	39	Menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat Melaksanakan rapat dengan OPD terkait kegiatan di bidang kesejahteraan Masyarakat yang dipimpin oleh asisten pemerintah dan kesra, kabag serta membuat notulen hasil rapat Menyampaikan notulen hasil fasilitasi kepemimpinan untuk mendapatkan arahan selanjutnya	254,111,621	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 15 dok menjadi 50 dok, ada kesalahan penulisan target seharusnya untuk target tetap 15 dok
(13) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Persentase Koordinasi Hukum yang Terfasilitasi	100	25	25	30	20	3,271,372,590	Kepala Bagian Hukum	
45	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	850 dokumen	100	150	300	300	Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah	583,166,634	Analisis Hukum Ahli Muda	
46	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	11 Kasus	1	1	1	8	meregister dalam surat masuk permohonan bantuan hukum mempelajari substansi perkara/ permasalahan di sesuaikan dengan peraturan perundang undangan pencermatan gugatan perdata maupun tata usaha negara koordinasi dan pengumpulan data dan bukti penyusunan telaahan staf, memeriksa telaahan staf lalu diserahkan keatasn langsung rapat koordinasi dengan pihak yang digugat membuat surat kuasa yang di tanda tangani pemohon dan menerima surat tugas dari pimpinan menghadiri sidang persiapan, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, relik, duplik, pembuktian, saksi saksi, kesimpulan pembacaan putusan oleh Hakim	2,431,135,984	Analisis Hukum Ahli Muda	Ada perubahan target dari 4 dok menjadi 11 dok, karena ada beberapa permintaan bantuan hukum dari desa, kelurahan dan kecamatan
47	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	100 Dokumen	25	25	30	20	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi hukum penyebarluasan daerah Jumlah produk hukum yang disosialisasikan Melaksanakan pendokumentasian Produk Hukum Daerah	257,069,972	Analisis Hukum Ahli Muda	
(14) Fasilitasi Kerjasama Daerah			Cakupan Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	100	25	25	30	20	760,568,235	Kepala Bagian Kerjasama	
								Invenrasasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan melalui pemetaan kerjasama daerah tahun 2025 Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi ke perangkat daerah dengan tema pemetaan kerjasama dan tata kerjasamaA dengan mengundang nara sumber dari kementerian dalam negeri Melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara kerjasama daerah Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan propinsi, kementerian, daerah lain dan pihak ketiga yang akan kerjasama			

48	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	25 MoU	6	6	7	6	<p>Rapat koordinasi dengan daerah lain, SKPD dan pihak ketiga yang akan bekerja sama</p> <p>Membuat telaahan staf ke Bupati tentang rencana kerjasama baik dengan daerah lain, instansi vertikal dan pihak ketiga, baik yang berasal dari usulan pemerintah, pihak ketiga maupun daerah lain baik kerjasama wajib maupun sukarela</p> <p>Menyusun Draft rencana kerja bersama dengan instansi teknis yang terlibat dalam rencana kerjasama yang akan dilaksanakan</p> <p>Menfasilitasi secara administrasi bagi pihak yang ingin melaksanakan penandatanganan kerjasama secara ceremonial</p> <p>Melaksanakan tandatangan kesepakatan bersama (MoU) dengan daerah lain, instansi vertikal dan pihak ketiga</p> <p>Melaksanakan penanda tangan</p>	419,265,000	Analisis Hukum Ahli Muda	
49	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	12 Laporan	3	3	3	3	<p>Melaksanakan fasilitasi evaluasi pemetaan kerjasama</p> <p>Melakukan koordinasi evaluasi kerjasama dengan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Paser</p> <p>Melaksanakan inventarisir dan revitalisasi kerjasama di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser</p> <p>Menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama</p>	341,303,235	Analisis Hukum Ahli Muda	
III	Meningkatnya koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan	90	-	-	-	90			Sekretaris Daerah	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100				100		6,418,222,622	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
	(15) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Bidang Ekonomi	100	25	25	30	20		1,002,057,691	Kepala Bagian Perekonomian	
50	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	5	6	6	7	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Kerja, menyusun anggaran kas, membuat jadwal kegiatan - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah, Dewan Pengawas, BUMD, BLUD - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Konsultasi dan koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dalam provinsi - Konsultasi dan koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD ke luar provinsi - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 	304,872,708	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
51	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	36 Laporan	9	9	9	9	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Kerja, menyusun anggaran kas, membuat jadwal kegiatan - Mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait permasalahan. - Melakukan Koordinasi dan Konsultasi permasalahan dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan. - Melakukan fasilitasi rapat koordinasi pengambilan kebijakan penyelesaian permasalahan. - Monitoring dan Evaluasi di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan. - Melakukan analisa dan penyusunan laporan. - Melaksanakan fasilitasi rakor hasil monitoring dan evaluasi untuk penyelesaian permasalahan terkait. 	363,066,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

52	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	24 Dokumen	6	6	6	6	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Kerja, menyusun anggaran kas, membuat jadwal kegiatan - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah, dan instansi terkait - Sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Konsultasi dan koordinasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan Perangkat Daerah, dan instansi terkait di dalam maupun di luar daerah - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 	302,171,031	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
53	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	12 Dokumen	3	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Kerja, menyusun anggaran kas, membuat jadwal kegiatan - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan perangkat daerah, Dewan Pengawas, BUMD, BLUD - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Konsultasi dan koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dalam provinsi - Konsultasi dan koordinasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD ke luar provinsi - Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan 	31,947,952	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
(16) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			100	25	25	30	20		993,481,644	Kabag Administrasi Pembangunan	
54	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	0	1	0	1	<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir surat usulan Rencana Pembangunan yang dilimpahkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk bahan rapat TAPD Melaksanakan dan memfasilitasi rapat koordinasi maupun rapat pimpinan di lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait Perencanaan Pembangunan dan sebagainya Melaksanakan Koordinasi / konsultasi pelaksanaan penyusunan program pembangunan ke Provinsi maupun ke Pusat / Kementrian Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Pembangunan Daerah Menyusun Dokumen pelaksanaan kegiatan 	311,438,830	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
55	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	3	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan Mengusulkan Rancangan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Operasional Kegiatan Melakukan Inventarisasi Data Kegiatan Pembangunan seluruh Perangkat Daerah Melakukan Inventarisasi Data Kemajuan Pengadaan Barang dan Jasa Melaksanakan Rapat Operasional Pengendalian Kegiatan Pembangunan Secara Berkala / Triwulan Melakukan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Lapangan/Lokasi Kegiatan Menyusun Laporan Kegiatan dan Menyampaikan kepada pimpinan 	340,686,592	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

56	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	3	3	3	3	Menyusun dan mengusulkan SK Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran Tahun 2025	341,356,222	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
								Menyusun Laporan Realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya yang dihimpun dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser			
								Melaksanakan Monitoring dan evaluasi dengan melakukan tinjauan lapangan dan rapat tindak lanjut permasalahan bersama perangkat daerah serta unsur terkait lainnya			
								Melaksanakan rapat Pimpinan sebagai evaluasi secara berkala (triwulan) bersama Bupati, Sekda, Staf Ahli, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah			
								Melaksanakan Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran setiap bulan untuk dilakukan rekonsiliasi dan evaluasi dari hasil data realisasi yang telah di input OPD di sistem aplikasi			
								Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan menyampaikan ke Pimpinan			
3.3	(17) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Hasil Proses PBJ	100	25	25	30	20		3,030,915,560	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
57	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	23000 Dok	50	1000	1200	50	Review Persiapan Pemilihan, Penelaahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	888,432,648	Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	250 Dok	25	75	75	75	Pemenuhan Standar LPSE, Pengelolaan Pengguna Layanan LPSE, Pengelola Katalog Elektronik versi 6 Kabupaten Paser (Termasuk Kegiatan rorkshop/pendampingan transaksi katalog elektronik versi 6 seluruh OPD)	1,225,578,397	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa ahli muda	
59	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	20 orang	3	10	4	3	Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	916,904,515	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa ahli muda	
3.4	(18) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100	25	25	30	20		1,391,767,727	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	
60	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal dan tenaga kerja	45 Dokumen	9	9	15	12	Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan	722,793,790	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 37 dok menjadi 45 dok , karena ada kegiatan yang harus di fasilitasi sehingga adanya penambahan ABT
								Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan			
								Melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan perangkat daerah, fasilitasi rapat permasalahan pertanian, fasilitasi rapat perangkat daerah daam menyusun kebijakan daerah			
								Mengikuti koordinasi baik di dalam propinsi maupun diluar propinsi			
								Melaksanakan koordinasi dan konsultasi baik di tingkat propinsi maupun ditingkat pusat			
								Melaksanakan monitoring pelaksanaan DBH sawit TA.2025, menyusun pelaporan penggunaan DBH Sawit, melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan DBH Sawit oleh perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi DBH Sawit			
								Melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2025 kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan di kawasan cagar alam teluk adang dan teluk apar			
								Melaksanakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan di Kawasan cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar			
								Mengikuti pelaksanaan kegiatan PEDANA Tahun 2025			
								Melaksanakan pendampingan BKSDA Kaltim dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan di kawasan cagar alam teluk adang dan teluk apar			
Melaksanakan survei lapangan bersama Balai KSDA Kalimantan Timur, PT. PLN (Persero) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser untuk pengambilan titik koordinat tiang listrik eksisting dan perencanaan di kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan CA Teluk Aneer											

								<p>Melaksanakan fasilitasi dan survei lapangan dalam rangka penyusunan kajian lapangan mitigasi dampak ekologis rencana kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dileakkan berupa pembangunan jaringan listrik PLN (persero) di CA Teluk Adang dan CA Teluk Apar di Kabupaten Paser antara Balai KSDA Kaltim dengan PT. PLN (Persero) bersama Tim Kerja Penyusunan Kajian Lapangan dari Balai KSDA Kaltim, Direktorat Perencanaan Konservasi dan Direktorat Konservasi Kawasan Dijen KSDAE Kementerian Kehutanan, PT. PLN (persero) dan Tenaga Ahli dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis Universitas Mulawarman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Paser.</p> <p>Melaksanakan fasilitasi rapat pembahasan dan presentasi hasil dokumen kajian mitigasi dampak ekologis rencana kerjasama pembangunan jaringan listrik PLN (persero) di Kawasan CA Teluk Adang dan CA Teluk Apar di Kabupaten Paser bersama Tim Kerja Penyusunan Kajian Lapangan</p>			
61	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik dan persandian	37 Dokumen	8	8	10	11	<p>Rapat koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan perangkat daerah urusan pertambangan dan lingkungan hidup</p> <p>Koordinasi Dan sinkronisasi kebijakan lingkungan hidup/ pertambangan ke luar propinsi</p> <p>Koordinasi Dan sinkronisasi kebijakan lingkungan hidup/ pertambangan ke luar propinsi</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lingkungan hidup dan pertambangan ke Kecamatan/Desa</p> <p>Pemantauan dan evaluasi Perusakan/pencemaran Pertambangan dan Lingkungan Hidup ke Kecamatan</p>	275,282,000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 35 dok menjadi 37 dok , karena ada penambahan anggaran sehingga jumlah dokumen nya bertambah
62	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan pertanahan	40 Dokumen	9	9	13	9	<p>Melaksanakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait kegiatan pembangunan listrik PLN dan kegiatan sambungan instalasi rumah tangga serta pengembangan jaringan listrik PLN serta kebijakan energi dan air lainnya</p> <p>Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Energi dan Air ke Luar Provinsi</p> <p>Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Energi dan Air ke dalam Provinsi ke PLN UP2K Kalimantan, PLN UP3 Kaltim dan Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur serta stakeholder terkait kebijakan energi dan air</p> <p>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan energi dan air ke kecamatan dan desa terutama untuk pembangunan listrik PLN di Desa Harapan Baru, Desa kepala Telake, Desa Rantau Layung dan Desa Rantau Buta</p> <p>Menyiapkan bahan dan data terkait kebijakan pembangunan listrik PLN dan kegiatan sambungan instalasi rumah tangga serta pengembangan jaringan listrik PLN serta kebijakan energi dan air lainnya</p> <p>Pemantauan dan kebijakan evaluasi energi dan air di Kabupaten Paser</p>	393,691,937	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ada perubahan target dari 37 dok menjadi 40 dok, Karena adanya penambahan koordinasi/fasilitasi dan penambahan dana

TANA-PASER, 20 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH,



PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196612111986091002